



PENGUATAN KEMANDIRIAN EKONOMI SANTRI MELALUI PENDAMPINGAN TATA KELOLA KOPERASI PESANTREN DI PONDOK PESANTREN RAUDLATUL QURRO KOTA SERANG

Hartono^{1*}, Ahmad Suhendra²

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STISNU Nusantara Tangerang

²STISNU Nusantara Tangerang

*Email: antonnying12@gmail.com

ABSTRAK

Pesantren memiliki posisi strategis dalam penguatan kemandirian ekonomi melalui koperasi pesantren. Namun, tata kelola koperasi masih menghadapi keterbatasan pada aspek administrasi, kapasitas manajerial, dan pemanfaatan teknologi. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas peserta dalam mengelola koperasi di Pondok Pesantren Raudlatul Qurro, Kota Serang. Kegiatan dilaksanakan pada 1–31 Agustus 2025 dengan pendekatan Participatory Action Research yang mencakup identifikasi kebutuhan, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi. Peserta berjumlah 30 orang yang terdiri atas santri, pengurus koperasi, dan pengurus pesantren. Evaluasi dilakukan melalui perbandingan skor pre-test dan post-test serta observasi keterampilan praktik. Skor rata-rata meningkat dari 56,29 menjadi 82,57, setara dengan kenaikan relatif sebesar 46,69%. Nilai N-Gain sebesar 0,601 menunjukkan efektivitas pada kategori sedang. Hasil observasi juga mengindikasikan peningkatan keterampilan peserta dalam pencatatan transaksi, pembukuan sederhana, pelayanan konsumen, dan pengelolaan persediaan. Pendampingan partisipatif memperkuat kompetensi dasar pengelolaan usaha dan keterlibatan santri dalam operasional koperasi. Keberlanjutan program memerlukan supervisi berkala, kaderisasi pengelola, standardisasi prosedur, dan digitalisasi administrasi secara bertahap.

Kata kunci: Kemandirian ekonomi; koperasi pesantren; kewirausahaan; pemberdayaan; santri.

STRENGTHENING THE ECONOMIC INDEPENDENCE OF *SANTRI* (ISLAMIC BOARDING SCHOOL STUDENTS) THROUGH GUIDANCE ON THE GOVERNANCE OF *PESANTREN* COOPERATIVES AT THE RAUDLATUL QURRO ISLAMIC BOARDING SCHOOL, SERANG CITY

ABSTRACT

Islamic boarding schools hold a strategic position in strengthening economic independence through pesantren cooperatives. However, cooperative governance remains constrained by administrative weaknesses, limited managerial capacity, and inadequate technology use. This community service program aimed to enhance participants' capacity to manage the cooperative at Raudlatul Qurro Islamic Boarding School, Serang City. Conducted from 1 to 31 August 2025, the program employed Participatory Action Research comprising needs identification, socialization, training, mentoring, monitoring, and evaluation. The program involved 30 participants, including students, cooperative administrators, and pesantren administrators. Evaluation was conducted by comparing pre-test and post-test scores and observing practical skills. The mean score increased from 56.29 to 82.57, equivalent to a relative increase of 46.69%. An N-Gain score of 0.601 indicated moderate effectiveness. Observations also indicated improvements in transaction recording, basic bookkeeping, customer service, and inventory management. Participatory mentoring strengthened basic business-management competencies and encouraged students' involvement in cooperative operations. Program sustainability requires periodic supervision, management regeneration, standardized procedures, and gradual administrative digitalization.

Keywords: Economic independence; empowerment; entrepreneurship; pesantren cooperative; santri.

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat yang memiliki tradisi pendidikan, keagamaan, dan sosial yang khas (Dhofier, 2011). Selain menjalankan fungsi pendidikan dan dakwah, pesantren juga memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat. Kedudukan tersebut memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang menetapkan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu fungsi pesantren (Republik Indonesia, 2019). Dengan demikian, pesantren memiliki posisi strategis dalam



mengembangkan sumber daya manusia yang mandiri, terampil, dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan sosial ekonomi.

Salah satu instrumen yang mendukung fungsi pemberdayaan tersebut adalah koperasi pondok pesantren atau kopontren, yang dikelola berdasarkan prinsip perkoperasian nasional (Republik Indonesia, 1992). Kopontren tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan warga pesantren, tetapi juga berpotensi menjadi laboratorium pembelajaran usaha yang menghubungkan pengetahuan ekonomi dengan pengalaman operasional. Melalui keterlibatan langsung, santri dapat mempelajari administrasi, pencatatan keuangan, pelayanan konsumen, pengelolaan persediaan, kerja sama, dan pengambilan keputusan. Pengembangan unit usaha pesantren dapat memperkuat kemandirian lembaga apabila santri dilibatkan dalam pengelolaan, pemasaran, dan pelaporan keuangan (Masrur & Arwani, 2022). Kopontren juga berperan dalam memperkuat perekonomian pesantren serta memberdayakan santri dan masyarakat sekitar (Saputra et al., 2023).

Penguatan koperasi pesantren juga relevan dengan kebijakan kemandirian pesantren. Rakhman (2024) menempatkan pengembangan sumber daya manusia yang mandiri dan terampil sebagai bagian penting dari fungsi pemberdayaan pesantren. Meskipun demikian, keberadaan koperasi belum dengan sendirinya menghasilkan manfaat ekonomi dan pedagogis. Kinerja koperasi dipengaruhi oleh kompetensi pengelola, ketertiban administrasi, transparansi keuangan, partisipasi anggota, dukungan pimpinan, akses permodalan, dan kapasitas adaptasi teknologi. Pembenahan kopontren karena itu memerlukan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan pada aspek kelembagaan, keanggotaan, serta keuangan (Muslim et al., 2023). Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan transparansi keuangan masih menjadi kendala, sedangkan digitalisasi administrasi dan pengembangan jejaring usaha dapat digunakan sebagai strategi penguatan tata kelola (Lesmana et al., 2025).

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa digitalisasi kopontren berpotensi meningkatkan efisiensi, transparansi, mutu layanan, dan peluang pengembangan usaha. Namun, proses tersebut kerap terhambat oleh rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur dan modal, serta belum tersedianya sistem yang sesuai dengan kapasitas pengelola (Afkarina et al., 2025). Penggunaan teknologi keuangan di lingkungan pesantren juga perlu disertai penguatan literasi fikih muamalah digital dan mekanisme pengawasan syariah agar efisiensi transaksi tetap selaras dengan prinsip syariah (Khakim, 2025). Integrasi kewirausahaan ke dalam pendidikan pesantren memerlukan tata kelola partisipatif, kepemimpinan adaptif, pengembangan kompetensi, dan evaluasi berkelanjutan agar inovasi ekonomi tetap sejalan dengan misi pendidikan pesantren (Akhmadi, 2025; Yahya et al., 2024). Oleh karena itu, program ini tidak hanya merespons keberadaan unit usaha, tetapi juga kebutuhan akan pendampingan partisipatif untuk meningkatkan kompetensi dasar pengelola dan menyiapkan digitalisasi yang sederhana, bertahap, dan berkelanjutan.

Pendidikan kewirausahaan yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman berpotensi membentuk keterampilan bisnis, karakter mandiri, dan kapasitas ekonomi santri yang berlandaskan prinsip syariah (Hakim et al., 2025). Kajian sistematis menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan kewirausahaan di pesantren dipengaruhi oleh integrasi kurikulum, pelatihan keterampilan, keberadaan unit usaha mandiri, kepemimpinan, ketersediaan sumber daya, akses pasar, dan dukungan eksternal (Nurdiansyah & Veri, 2025). Namun, kajian mengenai koperasi pesantren masih mengidentifikasi kendala berupa lemahnya manajemen, keterbatasan perluasan pasar, dan kuatnya persaingan usaha. Kondisi tersebut menegaskan perlunya penguatan manajemen strategis dan pendampingan yang berkelanjutan (Pramana et al., 2024).

Observasi awal dan wawancara dengan pengurus Pondok Pesantren Raudlatul Qurro, Kota Serang, menunjukkan bahwa pencatatan transaksi koperasi masih dilakukan secara sederhana dan belum terdokumentasi secara sistematis. Partisipasi santri dalam pengelolaan koperasi juga masih terbatas, sedangkan sarana digital untuk pencatatan transaksi dan pengendalian persediaan belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut membatasi fungsi koperasi sebagai wahana pembelajaran ekonomi dan kewirausahaan berbasis pengalaman.

Kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk menjawab kesenjangan antara keberadaan unit koperasi dan belum optimalnya fungsi koperasi sebagai sarana pembelajaran praktis. Secara khusus, program bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip dan tata kelola koperasi, meningkatkan keterampilan administrasi dan pembukuan sederhana, mendorong partisipasi santri dalam operasional koperasi, serta memperkenalkan teknologi sederhana untuk mendukung pengelolaan usaha. Pendekatan PAR dipilih karena menempatkan peserta sebagai mitra aktif dalam identifikasi masalah, pelaksanaan



tindakan, pengamatan, dan refleksi untuk memperbaiki praktik secara bersama-sama (Baum et al., 2006).

METODE

Lokasi, Waktu, dan Peserta

Kegiatan dilaksanakan di Pondok Pesantren Raudlatul Qurro, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, pada 1–31 Agustus 2025. Peserta berjumlah 30 orang, terdiri atas 12 santri putra, 14 santri putri, dua pengurus koperasi, dan dua pengurus pesantren.

Tabel 1. Komposisi Peserta Kegiatan

No.	Kategori peserta	Jumlah
1	Santri putra	12
2	Santri putri	14
3	Pengurus koperasi	2
4	Pengurus pesantren	2
Total		30

Sumber: Data kegiatan pengabdian (2025).

Pendekatan dan Tahapan Kegiatan

Program ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Pendekatan tersebut mengintegrasikan pengumpulan informasi, tindakan, observasi, dan refleksi bersama peserta sehingga hasil kegiatan dapat langsung digunakan untuk memperbaiki praktik pengelolaan koperasi (Baum et al., 2006). Tahapan kegiatan meliputi:

1. Identifikasi dan analisis kebutuhan melalui observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terarah bersama pengurus pesantren dan pengelola koperasi.
2. Sosialisasi mengenai prinsip perkoperasian, fungsi koperasi dalam pemberdayaan ekonomi pesantren, dan pentingnya kemandirian ekonomi santri.
3. Pelatihan administrasi koperasi, pembukuan sederhana, pelayanan konsumen, pengelolaan persediaan, dan pengenalan pencatatan digital.
4. Pendampingan praktik berupa pencatatan transaksi, penyusunan laporan pemasukan dan pengeluaran, penataan persediaan, serta simulasi pelayanan konsumen.
5. Pemantauan dan evaluasi melalui pre-test, post-test, observasi keterampilan, diskusi reflektif, dan penyusunan rencana tindak lanjut.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data kuantitatif diperoleh dari pre-test dan post-test yang mencakup tujuh indikator, yaitu konsep koperasi, prinsip koperasi, administrasi koperasi, pembukuan sederhana, kewirausahaan, pelayanan konsumen, dan pengelolaan persediaan. Setiap indikator dinilai pada skala 0–100, kemudian diringkaskan dalam bentuk skor rata-rata indikator. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan skor rata-rata sebelum dan sesudah program. Kenaikan relatif dihitung menggunakan rumus $[(\text{skor post-test} - \text{skor pre-test}) / \text{skor pre-test}] \times 100\%$. Efektivitas program dihitung menggunakan N-Gain, yaitu $(\text{kor post-test} - \text{skor pre-test}) / (\text{skor maksimum} - \text{skor pre-test})$, dengan skor maksimum 100. Data kualitatif diperoleh melalui observasi, wawancara, dan catatan kegiatan, lalu dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Pendampingan

Tahap awal menghasilkan pemetaan lima kebutuhan prioritas, yaitu penertiban pencatatan transaksi, penyusunan pembukuan sederhana, perbaikan pengelolaan persediaan, peningkatan kualitas pelayanan, dan pengenalan pencatatan digital. Materi pelatihan kemudian disusun berdasarkan

kebutuhan tersebut agar sesuai dengan kondisi aktual koperasi. Kegiatan tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi dilanjutkan dengan praktik dan pendampingan langsung di unit koperasi.

Tahap koordinasi awal digunakan untuk memvalidasi kebutuhan mitra, menyepakati ruang lingkup pendampingan, dan menetapkan pembagian peran sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Koordinasi awal dengan pengurus Pondok Pesantren Raudlatul Qurro

Selama pendampingan, peserta berlatih mencatat transaksi harian, membedakan pemasukan dan pengeluaran, memeriksa kesesuaian persediaan fisik dengan catatan, serta menerapkan pelayanan konsumen secara tertib. Pola ini sesuai dengan karakter PAR yang menghubungkan refleksi, pengumpulan data, dan tindakan perbaikan secara berulang (Baum et al., 2006). Keterlibatan santri dalam kegiatan nyata juga menjadikan koperasi sebagai ruang belajar kontekstual, bukan sekadar unit penjualan.

Pendampingan dilaksanakan secara partisipatif melalui penjelasan materi, diskusi, dan latihan pengelolaan koperasi bersama santri sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pelaksanaan pendampingan tata kelola koperasi pesantren bersama santri

Dokumentasi bersama pada Gambar 3 menunjukkan keterlibatan mahasiswa pelaksana kegiatan, pengurus pesantren, dan peserta setelah rangkaian pendampingan berlangsung.



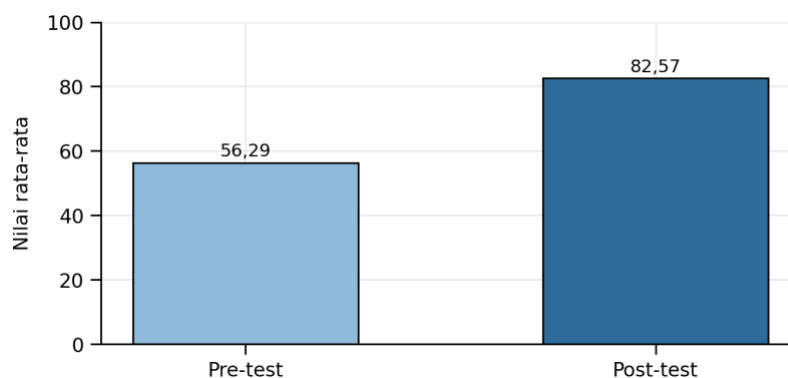
Gambar 3. Dokumentasi pelaksana KKM Mandiri dan peserta setelah kegiatan pendampingan

Peningkatan Pengetahuan Peserta

Tabel 2. Perbandingan Nilai Pre-test dan Post-test

No.	Indikator	Pre-test	Post-test	Selisih
1	Konsep koperasi	58	84	26
2	Prinsip koperasi	55	82	27
3	Administrasi koperasi	52	80	28
4	Pembukuan sederhana	50	78	28
5	Kewirausahaan	60	85	25
6	Pelayanan konsumen	62	86	24
7	Pengelolaan stok barang	57	83	26
Rata-rata		56,29	82,57	26,28

Sumber: Hasil olahan data kegiatan (2025).



Gambar 4. Perbandingan skor rata-rata pre-test dan post-test peserta

Sumber: Hasil olahan data kegiatan (2025).

Tabel 2 menunjukkan peningkatan skor pada seluruh indikator. Skor rata-rata meningkat sebesar 26,28 poin, dari 56,29 menjadi 82,57. Dibandingkan dengan skor awal, kenaikan relatif mencapai 46,69%. Peningkatan absolut terbesar terjadi pada indikator administrasi koperasi dan pembukuan sederhana, masing-masing sebesar 28 poin. Temuan ini menunjukkan bahwa materi yang diarahkan pada kelemahan awal mitra berkaitan dengan peningkatan penguasaan pengetahuan peserta. Meskipun demikian, tanpa kelompok pembanding, peningkatan tersebut belum dapat sepenuhnya diatribusikan hanya pada program pendampingan.

Efektivitas Program Berdasarkan N-Gain

Berdasarkan skor rata-rata pre-test sebesar 56,29 dan post-test sebesar 82,57, dengan skor maksimum 100, diperoleh nilai N-Gain sebesar 0,601. Nilai tersebut termasuk kategori sedang dan menunjukkan bahwa program mencapai 60,1% dari peningkatan maksimum yang secara teoretis dapat dicapai peserta. Hasil ini mengindikasikan bahwa program cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan jangka pendek. Namun, peningkatan efektivitas masih dapat diupayakan melalui durasi pendampingan yang lebih panjang, pengulangan praktik, dan penggunaan perangkat digital secara konsisten.

Peningkatan hasil evaluasi didukung oleh penyampaian materi yang menggabungkan penjelasan konseptual, diskusi partisipatif, dan latihan terarah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Penyampaian materi pengelolaan koperasi melalui diskusi partisipatif
Penguatan Tata Kelola dan Kemandirian Ekonomi Santri

Hasil observasi menunjukkan bahwa setelah pendampingan peserta mampu mencatat transaksi secara lebih sistematis, memisahkan pemasukan dan pengeluaran, serta memeriksa persediaan dengan lebih tertib. Perubahan tersebut penting karena tata kelola yang baik merupakan dasar transparansi dan akuntabilitas koperasi. Keterampilan itu juga memberikan pengalaman kepada santri dalam menerapkan kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, dan pengambilan keputusan usaha. Karena temuan observasi belum diukur dengan rubrik kuantitatif, hasil ini perlu dipahami sebagai indikasi perubahan keterampilan awal.

Unit koperasi berfungsi sebagai ruang praktik untuk menerapkan pencatatan transaksi, pelayanan konsumen, dan pengendalian persediaan. Kondisi unit usaha yang digunakan dalam pendampingan ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Kondisi unit koperasi pesantren sebagai lokasi praktik pengelolaan usaha

Koperasi pesantren dapat berfungsi sekaligus sebagai unit ekonomi dan sarana pendidikan kewirausahaan. Temuan kegiatan ini sejalan dengan Masrur dan Arwani (2022) serta Saputra et al. (2023), yang menunjukkan bahwa keterlibatan santri dalam pengelolaan unit usaha memberikan pengalaman dalam manajemen, pemasaran, dan pelaporan sekaligus memperkuat perekonomian

lembaga. Hasil ini juga mendukung Muslim et al. (2023) mengenai pentingnya pelatihan dan pendampingan dalam aspek kelembagaan, keanggotaan, dan keuangan. Dalam program ini, kemandirian ekonomi tidak dimaknai semata-mata sebagai kemampuan memperoleh pendapatan, tetapi juga sebagai kapasitas untuk mengelola sumber daya, membuat pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan, melayani konsumen, mengendalikan persediaan, dan menjaga keberlanjutan usaha.

Praktik pelayanan konsumen dilakukan melalui simulasi transaksi langsung untuk melatih ketelitian, komunikasi, dan tanggung jawab peserta. Tahapan praktik tersebut ditunjukkan pada Gambar 7 dan Gambar 8.



Gambar 7. Simulasi pelayanan konsumen pada unit koperasi pesantren



Gambar 8. Praktik transaksi penjualan dalam pendampingan operasional koperasi

Keterlibatan santri dalam unit usaha juga perlu ditempatkan sebagai proses pendidikan yang terencana. Pengelolaan unit usaha berbasis kewirausahaan dapat mengembangkan kemandirian emosional, perilaku, keterampilan, dan nilai ketika didukung pembagian tugas, kaderisasi, pendampingan, serta evaluasi rutin (Mawaddah, 2025). Dengan demikian, keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari transaksi dan pendapatan, tetapi juga dari perkembangan tanggung jawab, disiplin, kerja sama, dan kemampuan santri mengambil keputusan dalam situasi usaha.

Digitalisasi dan Keberlanjutan Program

Pengenalan pencatatan digital memberikan pemahaman awal mengenai manfaat teknologi bagi efisiensi administrasi, transparansi transaksi, dan pengawasan persediaan. Arah ini sejalan dengan Afkarina et al. (2025), yang menempatkan kompetensi sumber daya manusia, dukungan pimpinan, infrastruktur, dan kemitraan teknologi sebagai faktor penting dalam digitalisasi kopontren. Transformasi digital juga dapat dikembangkan melalui kegiatan ekonomi kreatif yang melatih komunikasi digital, motivasi kewirausahaan, produksi konten, dan kepemimpinan santri (Maulidizen et al., 2025). Penerapan teknologi tidak harus langsung menggunakan sistem yang kompleks. Tahap awal dapat memanfaatkan lembar kerja standar untuk buku kas, rekapitulasi penjualan, daftar persediaan, dan pencocokan stok. Tahap berikutnya dapat diarahkan pada pembatasan hak akses, pencadangan data, penetapan penanggung jawab, dan penyusunan laporan periodik. Dengan demikian, digitalisasi ditempatkan sebagai bagian dari proses pendidikan, bukan sekadar penggantian pencatatan manual (Akhmadi, 2025; Khakim, 2025; Yahya et al., 2024).

Keberlanjutan program didukung melalui kaderisasi santri dan penyediaan format administrasi yang dapat digunakan setelah kegiatan berakhir. Pengurus pesantren perlu melakukan supervisi berkala, menetapkan jadwal pergantian tugas, serta mengevaluasi kesesuaian catatan transaksi, kas, dan persediaan. Rencana tindak lanjut dapat dijalankan dalam tiga tahap, yaitu standarisasi format dan prosedur operasional, pendampingan pencatatan digital sederhana, serta evaluasi kinerja usaha berdasarkan omzet, margin, perputaran persediaan, selisih stok, dan sisa hasil usaha. Program ini



memiliki keterbatasan berupa durasi pendampingan yang singkat, jumlah peserta yang terbatas, tidak adanya kelompok pembanding, evaluasi pre-test dan post-test yang masih deskriptif, serta belum dilakukannya pengukuran tindak lanjut. Oleh sebab itu, hasil program belum dapat digeneralisasikan dan belum membuktikan dampak ekonomi jangka panjang.

SIMPULAN

Program pendampingan koperasi di Pondok Pesantren Raudlatul Qurro, Kota Serang, berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan awal peserta dalam pengelolaan koperasi. Skor rata-rata meningkat dari 56,29 pada pre-test menjadi 82,57 pada post-test, dengan kenaikan relatif sebesar 46,69% dan nilai N-Gain 0,601 yang termasuk kategori sedang. Perubahan juga teridentifikasi pada praktik pencatatan transaksi, pemisahan pemasukan dan pengeluaran, pembukuan sederhana, pelayanan konsumen, dan pemeriksaan persediaan. Pendekatan PAR relevan untuk menempatkan koperasi sebagai ruang pembelajaran kewirausahaan sekaligus instrumen penguatan kapasitas ekonomi santri. Namun, capaian tersebut bersifat jangka pendek dan belum membuktikan perubahan pada omzet, efisiensi biaya, perputaran persediaan, maupun sisa hasil usaha. Oleh karena itu, pengurus pesantren perlu menetapkan prosedur operasional standar, menyelenggarakan supervisi berkala, memperkuat kaderisasi santri, dan menerapkan digitalisasi administrasi secara bertahap. Evaluasi lanjutan perlu mengukur retensi kompetensi dan indikator kinerja usaha agar keberlanjutan serta dampak ekonomi program dapat dinilai secara lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada STISNU Nusantara Tangerang, pimpinan Pondok Pesantren Raudlatul Qurro, pengurus koperasi, pengurus pesantren, dan seluruh santri yang telah mendukung serta berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkarina, N., Magfiroh, V., Agustian, M. H., & Hakiki, S. A. (2025). Strategi pengembangan digitalisasi koperasi di Pondok Pesantren Baitul Hikmah. *Al Itamiy: Journal of Sharia Economic Law*, 7(1), 11–20. <https://doi.org/10.55606/ai.v7i1.1571>
- Akhmadi. (2025). Digital entrepreneurship as Islamic educational management in pesantren: Governance, moral supervision, and institutional sustainability. *JUMPA: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 261–276. <https://doi.org/10.33650/jumpa.v6i1.16822>
- Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. (2006). Participatory action research. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 60(10), 854–857. <https://doi.org/10.1136/jech.2004.028662>
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: Studi pandangan hidup kiai dan visinya mengenai masa depan Indonesia* (Edisi revisi). LP3ES.
- Hakim, N., Huda, F., & Rohani, I. (2025). Integrasi pendidikan agama Islam dan kewirausahaan di pondok pesantren: Model pengembangan kemandirian ekonomi santri di Pondok Pesantren Dalwa. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 6(2), 214–232. <https://doi.org/10.55380/tarbawi.v6i2.1090>
- Khakim, I. (2025). Digitalisasi ekonomi pesantren: Analisis hukum Islam terhadap penggunaan fintech syariah di lingkungan santri. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1). [https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8\(1\).22675](https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8(1).22675)
- Lesmana, R., Santoso, H., & Khotamin, N. A. (2025). Pengelolaan koperasi konsumen untuk kemandirian ekonomi pesantren: Studi di Pondok Pesantren Walisongo Lampung Tengah. *Berkala Hukum, Sosial dan Agama*, 2(1). <https://jurnal2.umala.ac.id/index.php/bhsa/article/view/206>
- Masrur, M., & Arwani, A. (2022). Pengembangan kemandirian ekonomi pondok pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2755–2764. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6001>
- Maulidizen, A., Hayati, S., Nugraha, R., Setiawan, A., Asis, A. A., As Shofy, M. U. A., & Azzami, M. N. (2025). Digitalisasi eco-pesantren: Podcastpreneurship sebagai strategi pemberdayaan ekonomi dan kepemimpinan santri Pesantren Tahfiz Assyifa Al-Islami Desa Waru Jaya, Bogor. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 39–53. <https://doi.org/10.30640/abdimas45.v4i2.5044>
- Mawaddah, N. A. (2025). Manajemen pesantren untuk membangun kemandirian santri berbasis kewirausahaan. *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 5(2), 392–404. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v5i2.2216>



- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muslim, S., Rokiyah, & Mundzir, H. (2023). Pemberdayaan koperasi pondok pesantren sebagai wujud efektivitas kemandirian ekonomi. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(2), 571–578. <https://doi.org/10.53625/jpm.v2i2.5088>
- Nurdiansyah, A., & Veri, J. (2025). Peran pesantren dalam membangun jiwa wirausaha santri: Systematic literature review berdasarkan metodologi PRISMA. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 15(2), 309–315. <https://doi.org/10.35968/mpu.v15i2.1567>
- Pramana, B., Rahmadana, R. F., Kusuma, A. A. A., Murtadho, I. R., & Huda, B. (2024). Analisis kemandirian santri dan pesantren: Studi pada kewirausahaan Koperasi Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya. *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v10i01.1154>
- Rakhman, M. T. (2024, September 25). *Kebijakan Kementerian Agama dalam membangun kemandirian pesantren di Indonesia* [Presentasi]. Regular Sharia Accounting Discussion. https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publicasi/Mukhammad%20Taufiqur%20Rakhman_RASHID%20September%202024.pdf
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992>
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122743/uu-no-18-tahun-2019>
- Saputra, A. A., Daud, & Kadarsih, S. (2023). Peran Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Jarinabi Mart dalam meningkatkan ekonomi Pondok Pesantren Jarinabi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4038–4047. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10820>
- Yahya, S. N., Nugraha, M. S., Hajar, E. S., Aisha, N., & Pradana, S. A. (2024). Integrating education and entrepreneurship: Strategic business development at pesantren in the era of digital disruption. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 22(3). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v22i3.1926>